

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bengkulu telah menunjukkan adanya upaya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. Kolaborasi tersebut terlihat melalui keterlibatan berbagai aktor dalam proses pembentukan koperasi, penyusunan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan koperasi, hingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

1. Aspek Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Pelaksanaan Program KKMP didukung oleh adanya kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membentuk koperasi pada seluruh kelurahan di Kota Bengkulu. Dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat menjadi modal awal yang cukup baik dalam pelaksanaan program. Namun demikian, masih ditemukan ketimpangan sumber daya antaraktor, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi, pengalaman dalam pengelolaan koperasi, serta

keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung operasional koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan setiap aktor dalam menjalankan program belum sepenuhnya merata.

2. Aspek Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KKMP telah memiliki aturan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan yang cukup jelas. Pembentukan koperasi dilakukan melalui sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan masyarakat sehingga memberikan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawab antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, serta masyarakat juga telah ditetapkan dengan cukup jelas. Meskipun demikian, efektivitas kelembagaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan administrasi dan manajerial sebagian pengurus koperasi sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

3. Pada Aspek Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, koordinasi, serta penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi koperasi. Pemerintah kelurahan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program. Sementara itu, pengurus koperasi berupaya menjalankan fungsi organisasi sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Peran kepemimpinan fasilitatif tersebut

menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi karena mampu mendorong komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program.

4. Aspek Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses telah mulai terbentuk melalui berbagai kegiatan sosialisasi, musyawarah, rapat koordinasi, dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Interaksi tersebut memungkinkan para aktor untuk membangun komunikasi dan menyamakan persepsi mengenai tujuan program. Kepercayaan antaraktor juga mulai tumbuh seiring dengan keterlibatan pemerintah dan pengurus koperasi dalam menjalankan program. Selain itu, adanya komitmen dari pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, dan masyarakat menunjukkan adanya keinginan bersama untuk mendukung keberhasilan Program KKMP. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar proses kolaboratif dapat berjalan secara lebih optimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu telah berjalan cukup baik dan telah mencerminkan unsur-unsur *Collaborative Governance* yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam aspek sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan sarana pendukung operasional koperasi, secara umum

pelaksanaan Program KKMP telah mengarah pada terwujudnya tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kota Bengkulu dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu terus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. Upaya tersebut perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi melalui pelatihan administrasi, manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, serta pengembangan unit usaha agar koperasi mampu beroperasi secara profesional dan mandiri.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai manfaat, tujuan, dan peluang yang dapat diperoleh dari keberadaan koperasi. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat.

Penguatan kelembagaan koperasi juga perlu dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi, peningkatan koordinasi antaraktor, serta penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai sehingga koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjalankan fungsi kelembagaan dan usaha secara optimal.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pembentukan koperasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh aktor untuk menjaga kolaborasi, membangun kepercayaan, memperkuat komitmen bersama, dan mengembangkan koperasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, dan masyarakat perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih yang efektif, partisipatif, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

